

Analisis Kebijakan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro

Policy Analysis of Ten Undergraduate Scholarship Programs Per Village in Bojonegoro Regency

Elsa Andhita Sari¹, Muhammad Miftahul Huda², Rupiersieh³

E-mail: andhita342@gmail.com, miftahjatim@gmail.com, arsieh_sakti@yahoo.com

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro

*corresponding author

Dikirimkan: 25-12-2024; Diterima: 16-01-2024; Diterbitkan: 18-01-2024

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i2.10069>

Abstract

Bojonegoro Regency is an oil and gas producing area with a total APBD of Bojonegoro Regency reaching 7.4 trillion, most of the budget comes from oil and natural gas products. However, the Human Development Index (HDI) achievement in Bojonegoro Regency is in the fifth lowest position in East Java due to the low quality of education in Bojonegoro Regency. The policy taken by the government to overcome this problem is the Ten Scholars Scholarship Program Per Village, which is expected to increase the interest of the people of Bojonegoro in continuing their education at university. This research aims to understand the cause and effect of the policy process for the Ten Scholars Per Village scholarship program in Bojonegoro Regency in overcoming the low quality of human resources in Bojonegoro Regency. This research uses a descriptive qualitative method with data sources obtained from the results of field studies through interviews, observation, and documentation techniques. The results of this research are that the Ten Scholars Per Village scholarship program in Bojonegoro Regency has been implemented by Perbup Number 17 of 2023. However, there are several obstacles to its implementation. The existence of this program policy can have a positive impact on increasing the HDI achievement of Bojonegoro Regency from medium scale to high scale.

Keywords: Policy Analysis, Programs, Scholarships.

Abstrak

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi memiliki total APBD Kabupaten Bojonegoro mencapai 7,4 triliun yang sebagian besar anggaran bersumber dari hasil minyak dan gas bumi. Namun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro menempati posisi lima terendah di Jawa Timur karena rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan yang di ambil pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa yang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat Bojonegoro untuk dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sebab akibat proses kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh dari hasil studi lapangan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2023, meski terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya namun dengan adanya kebijakan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan capaian IPM Kabupaten Bojonegoro dari skala sedang menjadi skala tinggi.

Keywords: analisis kebijakan, program, beasiswa.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan aspek paling penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia disuatu daerah, sudah semestinya jika masyarakat mengedepankan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas diri (H. Dendi, 2020). Melalui pendidikan seorang dapat mengasah kemampuan yang dimiliki dalam bidang tertentu, serta dalam menempuh pendidikan seorang lebih banyak mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan ditempat lain (Muvid, 2022). Setiap warga negara berhak menempuh pendidikan seperti halnya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwasannya tujuan dari bangsa Indonesia ialah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang dapat kita upayakan dengan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 yang menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang untuk membantu serta membiayai proses penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara indonesia dengan membuat program kebijakan dalam bidang pendidikan (Kusnandar, 2018; Nurhayati & Yuliani, 2022).

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah untuk memecahkan berbagai masalah dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat (Bahtiar & Munandar, 2021; Hariyoko, 2022). Dalam perumusan kebijakan perlu adanya proses analisis kebijakan guna mengetahui sebab akibat suatu kebijakan dibuat (Tenga et al., 2023). Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada (Pangestu, 2024). Jika sebuah program kebijakan tidak disertai dengan analisis kebijakan tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan yang dibuat tidak dapat menjawab atas masalah yang ada, bahkan dapat menimbulkan masalah yang baru (Raphael, 2015). Proses pengkajian terhadap kebijakan publik yang membahas mengenai urgensi masalah publik serta alternatif solusi yang ditawarkan dalam bentuk kebijakan dinamakan analisis kebijakan (Zulkarnain, 2017). Dunn menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Analisis kebijakan publik (*public policy analysis*) merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik.

Kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro merupakan program pemberian bantuan beasiswa yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Program ini didasari oleh masalah sosial ekonomi yang muncul, dilihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bojonegoro (Badan Pusat Statistik Provinsi Bojonegoro, 2022). Untuk mengatasi rendahnya kualitas SDM di Bojonegoro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa. Awal mulanya program beasiswa ini bernama Beasiswa Dua Sarjana Satu Desa yang diatur dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2019 namun saat ini telah mengalami Perubahan sebanyak empat kali yaitu Perubahan Pertama dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2020, Kedua Perbup Nomor 33 Tahun 2020, Ketiga Perbup Nomor 52 Tahun 2021, dan Perubahan yang keempat adalah Perbup Nomor 17 Tahun 2023 yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Perlu diketahui bahwasannya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang memiliki total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 7,4 triliun yang menempati posisi tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Jika dilihat dari indeks pembangunan manusia dengan APBD sebesar itu bisa dikatakan jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Bojonegoro masih cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain dengan APBD dibawah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini tentu menjadikan fokus tersendiri Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengatasi rendahnya IPM yang ada di Bojonegoro. Penilaian IPM di setiap daerah dapat dinilai dari tiga indikator diantaranya meliputi indeks kesehatan yang dapat diukur dari rata-rata harapan hidup, indeks pendidikan dapat diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek ekonomi yang diukur dari nilai daya beli (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2023). Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Bojonegoro hanya mencapai 12,84 Persen sementara rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bojonegoro 7,43 Persen sepanjang tahun 2022 (Farida et al., 2021).

Data tersebut menunjukkan masih banyaknya anak-anak di Kabupaten Bojonegoro yang belum mendapatkan akses dan kesempatan pendidikan yang layak. Rendahnya capaian IPM di Bojonegoro menjadi indikator kuat bahwa pembangunan di sektor pendidikan tampak kurang diperhatikan. Hal ini tentu menjadikan fokus tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengatasi rendahnya IPM yang ada di Bojonegoro. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Bojonegoro ialah dengan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Bojonegoro berada di urutan lima terendah di Jawa Timur yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan IPM Bojonegoro selama empat tahun terakhir mengalami keterlambatan.

Program Sepuluh Sarjana Per Desa diarahkan untuk mengatasi masalah rendahnya capaian IPM di Kabupaten Bojonegoro. Analisis sebab akibat suatu kebijakan dirumuskan untuk mengetahui sejauhmana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan model analisis kebijakan Dunn (2017). Ada lima tahapan proses analisis kebijakan, diantaranya Perumusan masalah, Peramalan masa depan, rekomendasi kebijakan, pemantauan kebijakan, dan evaluasi kinerja kebijakan. Perumusan masalah (*problem structuring/policy problem*) untuk proses identifikasi pemangku kebijakan. Tahap meramalkan masa depan kebijakan (*forecasting policy future*) untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan. Tahap rekomendasi kebijakan (*prescribing Preferred Policies*) merupakan proses mencari alternatif kebijakan melalui rekomendasi kebijakan yang sudah disusun. Tahap memantau hasil kebijakan (*monitoring policy outcomes*) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat kebijakan publik, pemantauan menyelidiki hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan hasil yang diamati maka pemantauan merupakan sumber informasi utama mengenai keberhasilan upaya penerapan kebijakan. Tahap penilaian kinerja kebijakan (*evaluation policy Performance*) tahap dimana evaluasi mengacu pada produksi informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan (Nurul Fika, 2023).

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan, proses penyaluran dana BOS yang belum terimplementasi dengan baik karena banyak sekolah yang mengeluh akibat keterlambatan proses pencairan dana BOS menjadi penghambat dalam proses peningkatan IPM (Christiana Tinggogoy, 2019). Pengimplementasian program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro terdapat beberapa kendala yaitu seperti minimnya transparansi informasi, inkonsistensi pencairan dana, dan alur birokrasi yang bertingkat-tingkat (Aidah, 2022). Serta Efektivitas Program Dua Sarjana Satu Desa bagi Mahasiswa tidak mampu di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro menemukan bahwa terdapat partisipasi masyarakat terhadap program beasiswa Dua Sarjana Satu Desa di Kabupaten Bojonegoro masih belum optimal, pada pelaksanaannya tergolong baik dan tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat masih rendah (Aisyah Wanda, 2022).

Kajian penyaluran dana beasiswa juga menjadi kesamaan lain dalam *research* ini. Namun yang membedakan penelitian ini berfokus pada tahapan perumusan suatu kebijakan menggunakan model analisis kebijakan. Dengan menggunakan model analisis kebijakan

diharapkan dapat mengidentifikasi proses pelaksanaan kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Perbup Nomor 17 Tahun 2023, sehingga penelitian ini dapat digunakan acuan untuk menilai seberapa efektif kebijakan program Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi rendahnya capaian IPM di Kabupaten Bojonegoro.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian yang diambil dalam penelitian program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini akan dikaji menggunakan teori analisis kebijakan menurut Dunn (2017) dengan menggunakan lima indikator utama yaitu Perumusan masalah kebijakan (*policy problem*), Peramalan masa depan kebijakan (*forecasting policy future*), rekomendasi kebijakan (*prescribing Preferred Policies*), pemantauan hasil kebijakan (*monitoring policy outcomes*), serta evaluasi nilai kebijakan (*evaluation policy performance*).

Pengambilan data menggunakan *purposive sampling* karena peneliti sudah memiliki pemetaan narasumber yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menkankan dengan hanya memilih informan-informan penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan lebih banyak terkait masalah yang akan diteliti, dimana tujuannya untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam pelaksanaan program kebijakan beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa ini. Informan dalam penelitian meliputi Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dan Kepala Bagian Fungsional Pranata Komputer Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan melalui teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah model dari (Miles et al., 2014) menggunakan analisis data melalui reduksi data pada data yang sudah didapatkan dan sesuai dengan kebutuhan, penyajian data dilakukan dengan menampilkan data secara visual lebih baik, dan penarikan kesimpulan sejalan dengan temuan di lapangan dan analisis yang dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dengan mengacu pada Perbup Nomor 17 Tahun 2023 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi yang terdapat didalamnya program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di

Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dilakukannya analisis kebijakan terhadap program Beasiswa Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat serta untuk mengetahui sejauhmana kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan begitu Pemerintah selaku pemangku kebijakan yang diwakili oleh Kepala Daerah diharapkan mampu menganalisis dengan tepat sebab akibat suatu kebijakan yang akan dibuat agar dapat mencapai hasil yang diharapkan (Bahtiar & Munandar, 2021) sebagai berikut:

a) Perumusan Masalah

Perumusan masalah atau *agenda setting* merupakan tahap yang paling krusial dalam Perumusan kebijakan (Pangestu, 2024), karena dalam tahap ini para pemangku kebijakan diharapkan dapat mengidentifikasi masalah publik yang muncul dalam lingkungan sosial masyarakat dengan menganalisis penyebab terjadinya isu melalui asumsi, pandangan serta diagnose masalah yang ada (Marsitadewi, 2022; Fernandez et al., 2024). Isu-isu sosial yang dapat menjadi masalah publik yang berdampak terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro yang mendasari kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro tak lepas dari unsur politik yang ada. Pemerintah sangat berperan penting dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan arah pembangunan daerah sebagai pembuat kebijakan atau *policy maker* (Muadi et al., 2016). Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyusun visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro periode 2018-2023, dan salah satu program prioritas kepala daerah dalam meningkatkan kualitas SDM yang berkelanjutan.

APBD Kabupaten Bojonegoro yang mencapai angka 7,4 triliun berada diposisi tertinggi kedua di Jawa Timur tahun 2023, namun berdasarkan data dari BPS capaian IPM Kabupaten Bojonegoro menempati urutan lima terendah di Jawa Timur. Rendahnya capaian IPM di Bojonegoro menjadi indikator kuat bahwa pemerataan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro masih belum maksimal. Kurangnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dapat diatasi melalui peningkatan mutu pendidikan dengan cara menyediakan layanan pendidikan yang merata sehingga minat sekolah bagi masyarakat lebih tinggi. Rendahnya capaian IPM dalam sektor pendidikan menjadi faktor bahwa pembangunan daerah di sektor pendidikan masih belum merata. Hal ini tentu menjadi masalah pemerintah daerah untuk segera diatasi agar tidak berdampak terhadap kualitas pembangunan daerah dimasa mendatang (Hariyoko et al., 2022).

b) Peramalan Masa Depan

Peramalan masa depan kebijakan (*forecasting policy*) merupakan tahap dalam

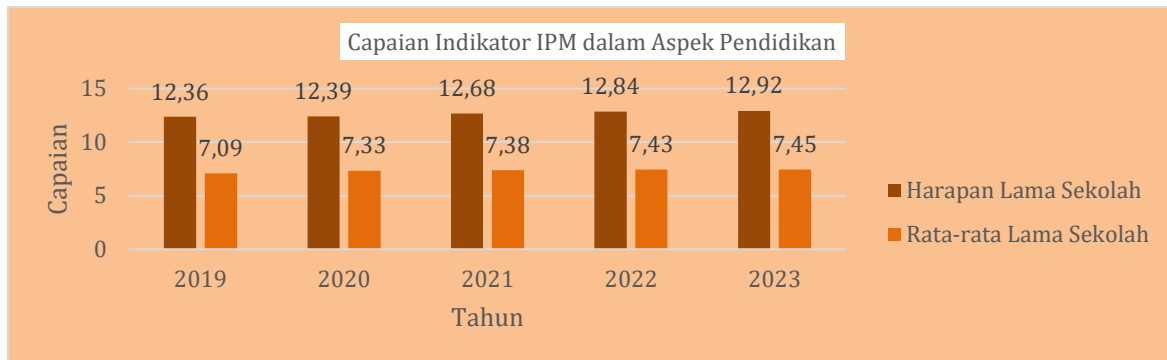
Perumusan kebijakan publik yang memprediksi arah masa depan kebijakan (Jailani, 2023). Dalam peramalan kebijakan terdapat proses untuk mengkaji informasi terkait masalah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam *agenda setting* (Kalalinggi et al., 2023). Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang dapat menyumbang 30% kebutuhan minyak nasional dan kawasan Kabupaten Bojonegoro telah menjadi kawasan tambang yang menghasilkan minyak dan gas bumi (Joko, 2004). Predikat daerah penghasil minyak dengan APBD tertinggi kedua di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro masih belum dapat dikatakan sebagai kabupaten yang dapat mencapai pemerataan pembangunan di segala bidang. APBD yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro dengan capaian IPM Kabupaten Bojonegoro berada di skala rendah dan menduduki posisi lima terendah di Jawa Timur. Dengan banyaknya cadangan minyak dan gas bumi (Migas) yang memiliki nilai jual tinggi memberikan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang ada di Bojonegoro. Rendahnya capaian IPM Kabupaten Bojonegoro menyebabkan daya saing Bojonegoro menjadi rendah. Pada saat ini sumber daya alam Kabupaten Bojonegoro masih belum memberikan manfaat untuk kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat (Ariyanti & Budi, 2013).

Kabupaten Bojonegoro diharapkan tidak hanya bergantung terhadap SDA yang dimiliki, karena tidak akan bertahan lama dan tidak dapat diperbarui lagi. Lapangan Banyu Urip memiliki cadangan minyak yang diperkirakan akan habis pada 15 tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus mulai berfokus pada sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan perkembangan daerah di masa mendatang. Untuk menyiapkan generasi yang mampu berdaya saing global Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan program pemberian bantuan pendidikan melalui beasiswa untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bojonegoro yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2027 akan mencetak 4.300 lulusan sarjana berbasis desa yang unggul dan berkompeten untuk memajukan pembangunan daerah.

c) Rekomendasi Kebijakan

Dunn (2017) beranggapan bahwa dalam analisis kebijakan juga berkaitan dengan wacana yang dimunculkan dalam kebijakan (*prescription in policy analysis*) dengan mengubah informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan dalam proses Peramalan menjadi informasi tentang kebijakan yang diinginkan atau sering disebut rekomendasi kebijakan (Herdiana, 2019). Prediksi mengenai konsekuensi di masa mendatang terkait masalah rendahnya IPM di Kabupaten Bojonegoro maka rekomendasi kebijakan yang diharapkan dengan meningkatkan kualitas SDM melalui bidang pendidikan. Pada tahun 2022 jumlah

lulusan sarjana di wilayah pinggiran Kabupaten Bojonegoro masih minim dilihat dari lambatnya kenaikan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Hal ini lantaran banyaknya anak yang putus sekolah karena kondisi ekonomi, dan juga kurangnya akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dari pusat kabupaten ke desa, serta Rendahnya pendapatan keluarga selalu menjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan.



Gambar 1. Capaian IPM Aspek Pendidikan (Sumber: BPS Kab.Bojonegoro., 2023)

Lambatnya pertumbuhan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Bojonegoro pada 4 tahun terakhir dikarenakan Program Beasiswa Dua Sarjana Satu Desa yang mulai dilaksanakan awal tahun 2019 belum cukup memberikan pengaruh terhadap kemajuan mutu pendidikan yang ada di Bojonegoro. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengubah kebijakan program beasiswa Dua Sarjana Satu Desa menjadi program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro. Penerapan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro dalam Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan tersebut memaksa pemerintah bertanggung jawab untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang termasuk didalamnya terkait pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan pemerintah dapat mengalokasikan APBD untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan. Hal tersebut dilanjutkan dengan ditetapkannya Perbup Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi tentang pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang sedang menempuh pendidikan tinggi, dapat dilihat dalam tabel 1.

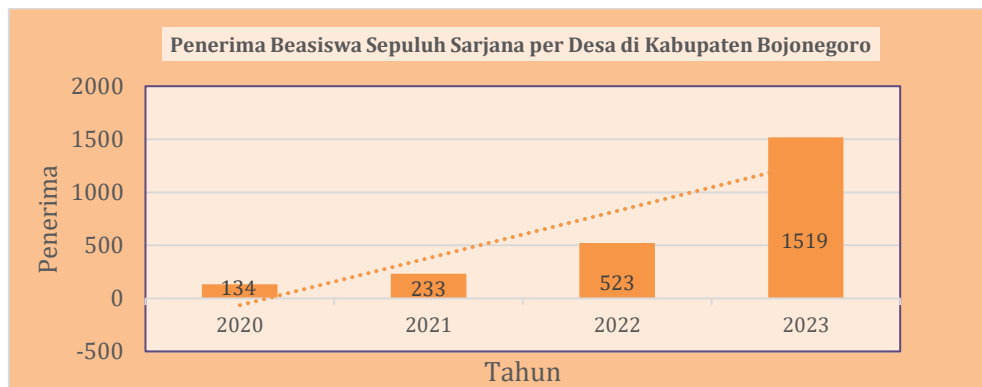
Tabel 1 Jenis Program Belasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi

Jenis Beasiswa	Sasaran
Beasiswa Scientist	Mahasiswa berprestasi
Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa	Mahasiswa tidak mampu
Beasiswa Tugas Akhir	Mahasiswa semester akhir
Beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Perangkat Desa

Sumber: (Disdik Kab.Bojonegoro, 2023)

d) Pemantauan Kebijakan

Pemantauan kebijakan memungkinkan produksi informasi tentang penyebab dan konsekuensi kebijakan (Lely, Rizka, Rendra, 2023). Pemantauan menyelidiki hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan kebijakan (Sarjono & Sulistiadi, 2018). Melalui pemantauan kebijakan informasi utama mengenai keberhasilan dalam penerapan kebijakan dapat diketahui (Sulistyaningsih et al., 2020). Dampak dari dilaksanakannya suatu kebijakan tidak dapat diketahui sebelum kebijakan dilaksanakan dan berdampak, misalnya program penyaluran dan pendidikan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa terhadap masalah rendahnya capaian yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro melalui pemantauan pelaksanaan kebijakan, penilaian kinerja kebijakan serta pelaporan hasil kebijakan bersinergi bersama pihak kecamatan untuk melakukan sosialisasi terkait program beasiswa agar informasi yang diberikan dapat menjangkau masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang berada di daerah terpencil. Pada gambar 2, dapat dilihat perkembangan penerima beasiswa pendidikan.



Gambar 2. Penerima Beasiswa (Sumber: Disdik Kab.Bojonegoro., 2023)

Dengan dilaksanakannya program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa ini ditahun 2023, terdapat peningkatan angka penerima beasiswa dengan tahun sebelumnya serta perbedaan serapan anggaran yang cukup tinggi yang dapat dilihat lebih detail pada table anggaran dibawah ini :

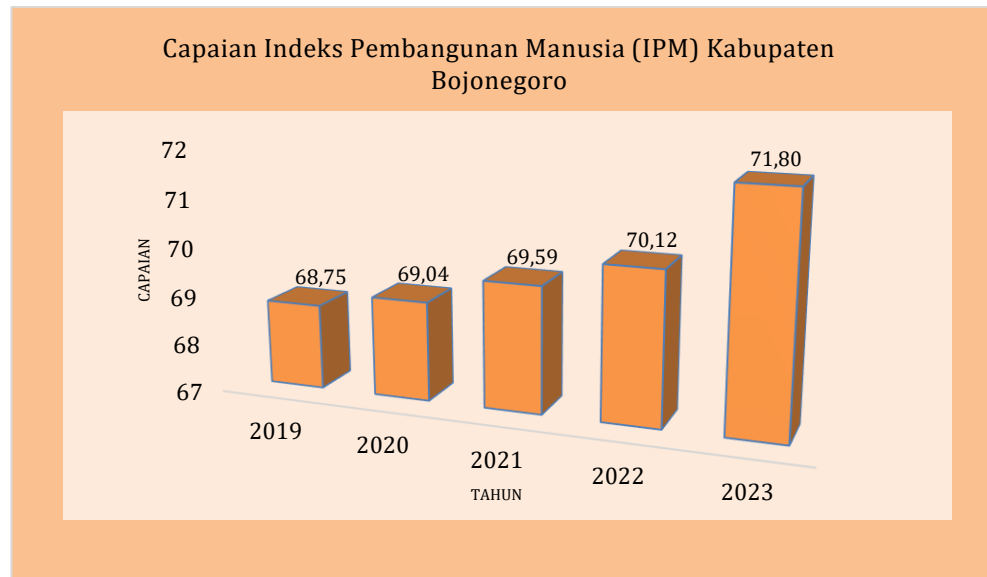
Tabel 1.2 Dana Anggaran & Serapan Anggaran Beasiswa SESAR

Tahun	Anggaran	Serapan
2020	23,6 Milyar	1 Milyar
2021	23,4 Milyar	2,2 Milyar
2022	23,1 Milyar	5 Milyar
2023	22,8 Milyar	14 Milyar

Sumber: Disdik Kab.Bojonegoro 2023.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan lantaran

bertambahnya penerima beasiswa pada tahun 2023. Setelah diterapkannya kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa cukup memberikan dampak positif terhadap meningkatnya capaian indikator IPM Kabupaten Bojonegoro dalam aspek pendidikan seperti yang terdapat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3. Capaian IPM (Sumber: BPS Kab.Bojonegoro., 2023)

Pada tahun 2023 Pertumbuhan capaian IPM Bojonegoro berada pada skala tinggi dimana pada tahun-tahun sebelumnya skala IPM Kabupaten Bojonegoro hanya mencapai skala sedang. Hal ini tentu merupakan dampak yang positif dari diterapkannya program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro.

e) Evaluasi Kinerja Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang didapat setelah kebijakan dilaksanakan, serta mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang dapat dilakukan Perbaikan di masa mendatang (Adhayanto et al., 2019). Fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan sebagai bentuk penilaian etis yang membantu menghasilkan informasi tentang dampak kebijakan terhadap hasil yang dicapai (Arifin Utha et al., 2022). Evaluasi dapat dilakukan setelah diterapkannya kebijakan sehingga permasalahan yang menjadi kelemahan dalam proses pelaksanaan kebijakan dapat diidentifikasi sehingga dapat dilakukan Perbaikan dalam penerapannya guna mencapai ketepatan (Rahman et al., 2023). Dari pengamatan lapangan hasil temuan pada penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Aidah Nahla yang menemukan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan, dalam proses kebijakan program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro juga ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan diantaranya:

1. Banyaknya Persyaratan yang diberikan kepada Penerima Beasiswa

Banyaknya persyaratan dalam pengajuan beasiswa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini tentu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ini lantaran hanya sedikit pendaftar beasiswa yang bisa lolos kualifikasi. Tidak terpenuhinya kuota beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa menjadikan anggaran yang telah disiapkan untuk program ini hanya dapat sedikit mengalami serapan. Dari banyaknya sisa kuota penerima beasiswa yang belum terpenuhi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meninjau ulang terkait Persyaratan bagi penerima beasiswa dalam rangka perluasan kemudahan dalam memperoleh beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa yang dilakukannya perubahan pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019.

2. Keterlambatan Pengumpulan Berkas Penerima Beasiswa

Keterlambatan pengumpulan berkas-berkas persyaratan penerima beasiswa berakibat pada proses pencairan dana beasiswa yang seringkali mengalami keterlambatan. Meskipun Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro telah memberikan batas waktu pengumpulan berkas, namun batas waktu lama yang telah diberikan tidak menjadikan jika penerima beasiswa segera mengumpulkan berkas Persyaratan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini lantaran banyaknya penerima beasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi diluar Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mengantisipasi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan berkas persyaratan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mengizinkan jika pengumpulan berkas dapat diwakilkan oleh pihak anggota keluarga atau dapat dikirim melalui kantor pos beralamatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Jika pada batas akhir pengumpulan berkas yang telah disepakati namun mahasiswa penerima beasiswa tidak kunjung mengumpulkan berkas, maka akan ditinggalkan untuk pengajuan tahun tersebut dan otomatis namanya sudah terdaftar sebagai penerima beasiswa untuk tahun selanjutnya.

3. Inkonsistensi Pencairan Dana Beasiswa Setiap Tahunnya

Tahap pencairan dana beasiswa merupakan penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten kepada penerima beasiswa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kepada penerima beasiswa ke rekening masing-masing penerima beasiswa setiap semesternya yang diberikan secara *at cost*, sebagai pengganti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester yang telah dilalui sebelumnya. Pencairan dana beasiswa menjadi faktor utama yang dapat membantu mahasiswa dalam membiayai kebutuhan pendidikan Perguruan tinggi. Untuk itu, tahap pencairan dana beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam proses pelaksanaannya pencairan dana beasiswa

Sepuluh Sarjana Per Desa setiap tahunnya berjalan tidak konsisten.

Terjadinya inkonsistensi pencairan dana beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa berasal dari keterlambatan pengiriman berkas-berkas Persyaratan dari penerima beasiswa mengingat banyak mahasiswa penerima beasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi diluar Kabupaten Bojonegoro dan juga tidak sedikit dari mahasiswa yang terlambat megumpulkan berkas-berkas dikarenakan harus menunggu surat Pernyataan dari kampus yang waktunya seringkali melebihi *deadline* pengumpulan berkas kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini tentu menjadi salah satu penyebab terjadinya inkonsistensi dalam pencairan dana beasiswa Sepuluh Sarjana di Kabupaten Bojonegoro.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Proses Seleksi Berkas Mahasiswa

Keterbatasan sumber daya dalam melakukan verifikasi data penerima beasiswa juga menjadi salah satu faktor kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro. Tim validator berkas beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa berjumlah 15 orang staf sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kasubbag umum dan semua staf umum. Mengingat banyaknya jumlah penerima beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa pada tahun 2023 mencapai 3800 penerima beasiswa baru dan lanjutan. Untuk memastikan program ini tepat sasaran maka diPerlukan penyeleksian data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam verifikasi data. Proses penyeleksian administrasi program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa memerlukan waktu yang lama melihat jumlah penerima beasiswa dengan jumlah tim validator sangatlah tidak seimbang. Kurangnya sumber daya manusia dalam proses verifikasi data penerima beasiswa menyebabkan proses pengecekan berkas menjadi tidak efektif dan efisien.

Dari hasil evaluasi kinerja kebijakan ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Meski terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, penerapan kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan IPM melalui angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bojonegoro.

4. Simpulan

Hasil penelitian dan analisis terhadap kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro bersandarkan pendapat Dunn, program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro berawal dari Perumusan munculnya masalah

publik terkait rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia. Rekomendasi kebijakan yakni beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa yang mampu meningkatkan capaian IPM di Kabupaten Bojonegoro. Faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa diantaranya banyaknya persyaratan bagi penerima beasiswa sehingga banyak calon penerima beasiswa tidak lolos dalam seleksi administrasi lantaran tidak sesuai dengan persyaratan, keterlambatan pengumpulan berkas penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan yang menjadikan inkonsistensi dalam pencairan dana beasiswa. Keterbatasan sumber daya dalam proses verifikasi data penerima beasiswa. Kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa ini dapat meningkatkan capaian indeks pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana di Kabupaten Bojonegoro dinilai cukup efektif untuk mengatasi rendahnya capaian IPM di Kabupaten Bojonegoro dalam bidang pendidikan.

5. Referensi

- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, S., & Nurhasanah. (2019). The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 125–136. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.125-136>
- Aidah, N. A. (2022). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.91>
- Aisyah Wanda. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM DUA SARJANA SATU DESA BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DI KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR. *Eprints IPDN*, 1–15.
- Arifin Utha, Justawan, & Marlita. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Di Kabupaten Buton Selatan. *Journal Publicuho*, 5(4), 1113–1126. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51>
- Ariyanti, D. R., & Budi, E. (2013). Pengaruh Sektor Migas terhadap Pengembangan Wilayah Bojonegoro. *Jurnal Teknik POMITS*, 2(2), 2011–2014. <https://doi.org/https://10.12962/j23373539.v2i2.4343>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. *Bps.Go.Id*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bojonegoro. (2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur. *Bps.Go.Id*, 57, 1–10.
- Bahtiar, A., & Munandar, A. I. (2021). STAKEHOLDER ANALYSIS PADA KEBIJAKAN PEMANFAATAN TELEMEDICINE DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(April). <https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i1.1304>
- Christiana Tinggogoy, D. (2019). Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana

Bantuan Operasional Sekolah). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(1), 55–69. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i01.37>

Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

Farida, Y., Sulistiani, D. A., & Ulinnuha, N. (2021). PERAMALAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BOJONEGORO MENGGUNAKAN METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING BROWN. *Jurnal Ilmiah Teori Dan Matematika*, 6(September 2021), 173–183. <https://doi.org/10.30598/variancevol5iss1page67-78>

H. Dendi, P. S. (2020). Pembangunan sektor pendidikan sebagai penunjang indeks pembangunan manusia di kota bandung 1,2. *JURNAL AGREGASI (Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi)*, 8, 43–50. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765>

Hariyoko, Y. (2022). Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 Sampai 2021. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 209–218. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.264>

Hariyoko, Y., Puspaningtyas, A., Nirmala, E. R., & Larasati, N. (2022). Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Sektor Unggulan Kota Surabaya dalam Masa Pandemi Covid-19. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 06(2), 84–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p84-90>

Herdiana, D. (2019). REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMULIHAN PARIWISATA PASCA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANDUNG Pendahuluan. *Jurnal Harian Regional*, 7, 1–30. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2020.V07.I01.P01>

Jailani, M. A. (2023). Forecasting Policy Pemindahan Kegiatan Pemerintahan Terhadap Pembangunan di Wilayah Selatan Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 9(2), 80–87. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap/2023.009.02.5>

Joko, S. (2004). Pengembangan Kota Migas Bojonegoro Berbasis Kemitraan dan Lingkungan suatu Tinjauan Aplikasi Teknologi Remote Sensing- Geographic Information System (RS-GIS) untuk Kajian Kewilayahan. *Jurnal Lemigas*.

Kalalinggi, R., Hisdar, M., Sarmiasih, M., & Wijaya, A. K. (2023). Forecasting The Development of IKN (New National Capital) in Sustainable Development , Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 48–59. <https://doi.org/10.18196/jgpp/v10i1.16786>

Kusnandar, I. (2018). Analysis Of Certification Policy Implementation. *JETL (Journal Of Education, Teaching and Learning)*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.26737/jetl.v3i1.602>

Marsitadewi, K. E. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(2), 239–252. <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7345>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third). SAGE Publications, Inc.

Mindarti1, L. I., Amalia, R., Wismanu, R. E., & Akbar, D. G. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (Studi Tentang Inpres No 12/2011 pada Bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional

di Kota Jakarta Selatan). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 59–70.
http://repository.ub.ac.id/190316/1/SRI_UMIYATI.pdf

- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muvid, M. B. (2022). Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia. *JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN EKONOMI*, 7(2), 469–476. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.153>
- Nurul Fika, A. F. dan A. Q. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 5(4), 16737–16747.
- Pangestu, D. T. (2024). Analisis Formulasi Kebijakan Smart City (Studi pada Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 142–156.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.9729>
- Perbup Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (p. 8). (2023).
- Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.pdf (p. 43). (2020).
- Rahman, A., Dwi, W., Zebua, A., Satispi, E., Hidayah, T. N., & Aini, Z. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA PROGRAM PRAKTISI PENGAJAR. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 515–523. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8356>
- Raphael, N. L. (2015). New Trends Of Public Policy Formulation In Developing Countries. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 3, 1–11. <https://doi.org/10.22146/jakp.8478>
- Sarjono, A. H., & Sulistiadi, W. (2018). Analysis of Policy Implementation for The Improvement Capability of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) at Inspectorate General of Ministry of Health. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.7454/ihpa.v3i1.2104>
- Sulistyaningsih, T., Kamil, M., Studi, P., Pemerintahan, I., & Malang, U. M. (2020). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(11), 1–12. <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.9379>
- Tenga, L. W., Arvianti, E. Y., & Sasmito, C. (2023). Analisis Tata Kelola Kebijakan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Malang Analysis o Parking Tax Policy Governance and Parking Retribution in Malang City. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 19–33. <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.8025>
- Zulkarnain, U. (2017). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4068>